

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- Andi Hamzah. (2008). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anggraini, A. M. T. (2013). Sinergi Bumn Dalam Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha. *Mimbar Hukum*, 3(25), p. 447-460. <https://doi.org/10.22146/jmh.16072>
- Arifin, R. (2020). “Korupsi di Pelabuhan: Studi Analisis Good Governance”. *Jurnal Hukum Pelayaran*, 5(1), 45-60.
- Asriana Issa Sofia (et al.). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud RI, 2011.
- Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!, Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, diakses pada Senin, 23 Juni 2025, pukul 17.15 WIB.
- H.A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Ini Beda Gratifikasi, Suap, Pemerasan, dan Uang Pelicin, Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, diakses pada Senin, 23 Juni 2025, pukul 17.30 WIB.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Sektor Kelautan dan Perikanan.
- Ismail. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Legelite: Jurnal Perundang- Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Kementerian BUMN. (2021). Siaran Pers Penggabungan Pelindo.

<https://bumn.go.id>

Kementerian BUMN. Pedoman Umum Good Corporate Governance BUMN.  
Kementerian BUMN, 2020.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 151 Tahun 2023 tentang Penugasan  
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis.

Khairandy, R. (2009). Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya  
Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang  
Dipisahkan dan Keuangan Negara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*,  
16(1), p. 73-87. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art5>

Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan  
Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK, 2006.

Korupsi, KBBI, diakses pada Senin, 23 Juni 2025, pukul 17.00 WIB.

Mangihut Siregar. Antikorupsi. Surabaya: UWKS Press, 2023.

Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: Andi,  
2009).

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata  
Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) dibawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Nomor PM.57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2022. <https://peraturan.bpk.go.id>

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor

- 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Profil dan Layanan Perusahaan. 2022. <https://www.pelindo.co.id>.
- R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bogor: Politea, 1986.
- Rizki Ramadhani (et al.). Problematika Tindak Pidana Korupsi. Indramayu: Penerbit Adab, 2024.
- Romadon, R. C. (2021). Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk. *Media Iuris*,4(1), p. 73-90. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.23669>
- Simons, Het Nederlandsche Strafrecht, dikutip dalam Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986).
- Soerjono Soekanto. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986).
- Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-2/MBU/07/2019 tentang Penguatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.
- Tim Garda Tipikor. Kejahatan Korupsi. Yogyakarta: Rangkang Education, 2016.
- Transparency International Indonesia. (2022). *Laporan tahunan Transparency International Indonesia*. Transparency International Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

United Nations Development Programme (UNDP), Governance for Sustainable Human Development, UNDP Policy Paper, 1997.

Valarie A. Zeithaml, A. Parasuraman, dan Leonard L. Berry, *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations* (New York: The Free Press, 1990).

Van Hamel, *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*, dikutip dalam Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986).